



Hadiyati Munawaroh

Raih Cumlaude

KOTA Semarang sebagai kota pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menarik perhatian Hadiyati Munawaroh, SE, Akt, M. Ak.

Calon doktor program studi Administrasi Publik Universitas Diponegoro ini meneliti implementasi kebijakan SAP berbasis akrual dalam disertasi doktoralnya.

Dalam sidang doktoral di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana TTB A Lantai I Undip, Hadiyati mempertahankan disertasi yang disusunnya dengan bimbingan Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, MSi, Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph. D dan Dr. Kismartini, MSi. Hadir dan turut menyaksikan sidang promosi doktor ini adalah Walikota Semarang Bupati Jepara dan Kudus.

Menurut Hadiyati yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Auditorat Jawa Tengah I pada BPK perwakilan Jawa Tengah ini, pengimplementasian SAP berbasis akrual di Kota Semarang mengalami kecenderungan yang semakin baik meskipun mengalami banyak kendala dan hambatan.

Hidayati mengungkapkan, masih ada 528 pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan SAP berbasis akrual meski peraturan perundangan telah mengamanatkan batas waktu akhir pengaplikasiannya pada 2015. "Keberhasilan Kota Semarang dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual ini, lanjut Hadiyati, ditandai salah satunya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun 2012 dan 2013," katanya.

Oleh BPK, materi laporan yang disajikan dinilai sudah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Keberhasilan ini pula yang kemudian membuat Kota Semarang ditunjuk sebagai pusat pengembangan implementasi laporan berbasis akrual lembaga ekonomi dunia SECO. Sejak 2012, kurang lebih 528 pemkab maupun pemkot di Indonesia belajar mengenai SAP berbasis akrual di Kota Semarang.

Menurut Hadiyati, sejumlah kendala pengaplikasian SAP berbasis akrual yang dihadapi Kota Semarang diantaranya adalah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang disusun pemerintah pusat kurang memadai dan dikomunikasikan dengan tidak jelas, tidak lengkap dan tidak konsisten dengan SAP berbasis akrual. Selain itu, sumber daya manusia yang kurang memadai serta fragmentasi unit kerja yang tidak didukung koordinasi antar unit kerja menjadikan penerapan SAP berbasis akrual berkendala.

Namun, diakui Hadiyati komitmen kuat dan dukungan dari pihak internal serta eksternal membuat penerapan SAP berbasis akrual di Kota Semarang tetap bertahan dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam disertasinya, Hadiyati memberikan sejumlah rekomendasi guna perbaikan SAP berbasis akrual di Kota Semarang. Yakni, komunikasi kebijakan SAP berbasis akrual ke pemerintah pusat, penyediaan SDM unggul, sistem informasi keuangan yang terkomputerisasi dan terintegrasi, evaluasi SOP atas fragmentasi unit kerja sehingga mendukung SAP berbasis akrual. (sgt)